

**Manajemen Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik
(Studi Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan di Kota Pekanbaru Tahun 2012)**

M. FAJAR. ANUGERAH

Dosen pembimbing : DR. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

Phone / Fax : +62 (0)761 , 63277

Website : <http://fisip.unri.ac.id>

Anugerahfajar34@yahoo.co.id

ABSTRACT

Public service is an attempt to meet the basic needs of the state and the civil rights of every citizen in the goods, services, and administrative services provided by public service providers. Road which is one form of government services to the community is very important to note, from the complementary parts, one of which is a public street lighting has not been felt their effectiveness for road users, especially at night.

This study aims to determine the management of the regional government in the management of public street lighting by the Department of Hygiene and Pekanbaru City and to determine the factors that influence the management of the public street lighting. Using resources through informants. In this study, the informant was a member of Commission II DPRD Pekanbaru, Head of Parks and Street Lighting, Street Lighting Section Head and Head of PLN branch of Pekanbaru. While the techniques of data collection consisted of interviews , documentation and observation with the source data consists of primary data and secondary data.

From the results of the study showed that the management of the regional government in the management of public street lighting by the Department of Hygiene and Pekanbaru to the process of planning, organizing, implementing , coordinating and monitoring has not gone up . The factors that influence in the management of public street lighting consists of human resources and infrastructure, the participation of the community , traffic congestion.

Keywords :Management, Public service, Light Manajement

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam distribusi barang dan jasa, peningkatan perekonomian, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Untuk mendukung kinerja jalan diperlukan bangunan pelengkap jalan, diantaranya adalah lampu penerangan jalan. Lampu penerangan jalan dapat digunakan untuk mengurangi jumlah kecelakaan pada malam hari terutama untuk jalan yang dilalui oleh kendaraan roda dua, jalan yang bersinggungan dengan lingkungan penduduk di sekitar jalan.

Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau adalah pusat Pemerintahan daerah dan pusat perkembangan daerah yang telah mengalami perkembangan pesat dengan jumlah penduduk dan pembangunan, tidak terlepas dari pelaksanaan dari program yang dicanangkan langsung oleh pemerintah pusat terhadap daerah. Optimalisasi fungsi lampu jalan merupakan pelayanan dan juga kebutuhan mendesak. Apalagi, Pekanbaru telah mendeklarasikan dirinya sebagai kota metropolitan, sesuai dengan visi pemerintah Kota Pekanbaru. Tapi fenomenanya banyak sejumlah lampu penerangan jalan umum (LPJU) di Kota Pekanbaru yang tidak menyala pada malam hari.

Berikut dibawah ini daftar titik lampu penerangan jalan umum resmi di Kota Pekanbaru tahun 2012.

Tabel 1.1
Daftar Titik Lampu Penerangan Jalan Umum Resmi di Kota Pekanbaru Tahun 2012

No	Lokasi	Jumlah jalan	Lampu kabel bawah tanah		Lampu kabel udara	
			Son-T 400 watt	Son-T 250 watt	Son 250 watt	HPL-N 250 watt
A	Jalan Naional	3		176		
B	Jalan Provinsi	20	1292	589	539	49
C	Jalan Kota	85		21	1550	30
Jumlah (A+B+C)		108	1292	786	2089	79
Total			4246			

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru tahun 2012

Dari data yang tersedia pada tabel LPJU resmi tersebut terdapat beberapa ruas jalan yang tidak optimal dalam penggunaan. LPJU yang tidak hidup diantaranya adalah Jalan Soebrantas ujung yakni pada simpang empat arengka sampai simpang empat simpang baru, Jalan Soekarno Hatta dari simpang empat mal ska sampai simpang empat jalan durian dan jalan soekarno hatta menuju Batrai Q, Jalan Tanjung Batu, dan Jalan OKM Jamil tepatnya

dibelakang Purna MTQ. Ini jelas membuat kenyamanan serta rasa aman masyarakat menjadi terganggu.

Namun permasalahan lain karena jumlah penduduk dan bangunan yang semakin lama semakin tumbuh pesat adalah tentang banyaknya lampu jalan yang belum di meterisasi. Sebab sampai saat ini banyak PJU belum di meterisasi yang bertebaran dan ini dinilai merugikan Pemko maupun PLN, namun di sisi lain masyarakat tersebut berhak untuk mendapatkannya. Dari data yang tersedia daya PJU yang tercatat di PLN Cabang Pekanbaru sebesar 10.022.000 VA namun sampai saat ini tidak ada pembatasan yang jelas terhadap arus tersebut sehingga banyak lampu PJU yang melebihi dari standar yang Ditentukan pemakaiannya.

Berikut adalah daftar rekapitulasi rekening lampu jalan meterisasi dan non meterisasi pemerintah kota Pekanbaru tahun 2012

TABEL 1.3

**Daftar Rekapitulasi Rekening Lampu Jalan Meterisasi dan Non Meterisasi
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012**

No	Bulan	Jumlah Tagihan (Rp)	
		Meterisasi	Non-Meterisasi
1	Januari	290.194.570	2.945.347.260
2	Februari	289.270.680	2.941.349.760
3	Maret	288.082.015	2.941.349.760
4	April	278.398.205	2.941.349.760
5	Mei	272.313.785	2.941.348.838
6	Juni	296.802.740	2.941.348.838
7	Juli	320.980.600	2.941.348.838
8	Agustus	300.242.810	2.941.348.838
9	September	312.618.855	2.941.348.838
10	Oktober	353.595.643	2.941.348.838
11	November	406.543.150	2.941.348.838
12	Desember	398.060.633	2.941.348.838

Sumber PT PLN (persero) Cabang Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas terdapat lebih besarnya pembayaran terhadap lampu jalan non-meterisasi dibandingkan dengan lampu jalan meterisasi, diketahui bahwa kerugian PLN untuk membayar lampu jalan yang belum di meterisasikan adalah sebanyak Rp 3,3M.

1.2 Kerangka Teoritis

Teori merupakan serangkaian konsep defenisi dan proposisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena. Berdasarkan hal tersebut, maka berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa teori yang hubungannya dengan masalah yang penulis ungkapkan.

1.4.1 Manajemen Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Manajemen

(George Terry) Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia lainnya.

b. Pengertian Pemerintahan

(C. F. Strong) Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, *pertama* harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, *kedua* harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, *ketiga* harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

1.4.2 Pelayanan Publik

Pengertian pelayanan publik menurut **Budiono. B**, adalah pengabdian yang mengutarakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku melayani bukan dilayani, mendorong bukan menghambat, mempermudah bukan mempersulit, sederhana bukan berbelit-belit dan terbuka untuk semua orang bukan untuk segelintir orang.

1.4.3 Manajemen Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik

Dalam pilihan publik, pemerintah daerah seharusnya secara aktif dan positif dalam perekonomian yang dikaitkan dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Fungsi pemerintah daerah utamanya dalam bidang perekonomian adalah sebagai berikut : (a) pembentukan kerangka landasan hukum (peraturan daerah), (b) penyusunan kebijakan publik dan rencana pembangunan daerah jangka menengah (RPJM), (c) menyediakan (memberikan) pelayanan publik kepada masyarakat secara tepat, cepat, murah, dan bermutu.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang ditemui dilapangan yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian yaitu : *“Bagaimana Manajemen Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan lampu penerangan jalan di Kota Pekanbaru Tahun 2012 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya ?”*

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi penelitian di atas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan manajemen pengelolaan lampu penerangan jalan di Kota Pekanbaru tahun 2012 dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1.4.2.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian secara lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan pengelolaan penerangan jalan di Kota Pekanbaru tahun 2012.

1.4.2.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan instansi terkait yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang pengelolaan penerangan jalan di Kota Pekanbaru tahun 2012

METODE PENELITIAN

1.5 Teknik Pengumpulan Data

- 1.5.1 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada obyek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.
- 1.5.2 Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang ada pada instansi atau badan yang relevan untuk menyusun deskriptif wilayah penelitian dan untuk melengkapi bahan analisa.
- 1.5.3 Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Menurut Alwasilah menyatakan bahwa observasi adalah penelitian atau pengamatan sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan reliabilitasnya

1.6 Jenis Data

- 1.6.1 Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa informasi dari wawancara. Dilakukan untuk mengetahui fakta langsung mengenai bagaimana pengelolaan penerangan jalan di kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi data primer dalam penulisan meliputi : Manajemen Pemerintah Daerah dalam mengelola lampu penerangan jalan umum.
- 1.6.2 Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi, media massa atau keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang sedang diteliti, seperti dokumentasi data kecelakaan pada malam hari di Kota Pekanbaru Tahun 2012, arsip, dan keterangan- keterangan lain lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung.

1.7 Teknik Analisa Data

Setelah data-data diperoleh, maka data tersebut diolah secara deskriptif dengan maksud untuk menggambarkan pengelolaan lampu penerangan jalan di kota Pekanbaru dengan melihat seperti apa hasilnya terhadap kepuasan masyarakat Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Manajemen Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru

Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang pelaksanaan dari manajemen yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan lampu penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru, dimana penelitian ini mengambil fokus kepada 5 variabel bebas yang menerangkan keberhasilan tentang manajemen pengelolaan lampu penerangan jalan umum yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Variabel tersebut adalah *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Directing* (Pelaksanaan), *Coordinating* (Pengkoordinasian) dan *Controlling* (Pengawasan).

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pengelolaan lampu penerangan jalan di Kota Pekanbaru tahun 2012 dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, maka penulis akan menguraikan dan menjelaskan hal-hal tersebut didukung oleh data dan informasi yang berhasil diperoleh baik dari fenomena dilapangan, hasil wawancara dan data yang peneliti peroleh dari informan penelitian sebagaimana teknik triangulasi sumber yang peneliti gunakan yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan semua pihak yang terkait dalam penelitian ini serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.1.1 Perencanaan

Dalam kegiatan manajemen hal yang pertama sekali dilakukan untuk mencapai tujuan adalah perencanaan. Perencanaan adalah merupakan fungsi manajemen yang paling dasar dibandingkan dengan fungsi manajemen lainnya. Hal ini dapat dipahami, karena memang pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya sangat bergantung pada fungsi perencanaan.

dapat diketahui bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru meliputi perencanaan sebagai berikut :

3.1.1.1 Perencanaan pemasangan lampu baru di ruas jalan yang belum ada lampu penerangan jalan umum

perencanaan pemasangan lampu jalan di ruas-ruas jalan kelurahan atau kecamatan adalah dengan alasan untuk kenyamanan dan beraktivitas pada malam hari. Perencanaan pemasangan lampu yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas terutama pada malam hari pada jalan-jalan yang sudah dipasang lampu penerangan jalan umum.

3.1.1.2 Perencanaan meterisasi

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota selaku pelaksana kebijakan mengenai meterisasi lampu penerangan jalan mulai berangsur melaksanakan perencanaan tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPRD Kota Pekanbaru. Berdasarkan kebijakan inilah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan melakukan meterisasi di ruas-ruas jalan yang ada di Kota Pekanbaru. tujuan dari perencanaan meterisasi ini adalah supaya pengelolaan lampu penerangan jalan tercapai sesuai target dan tidak ada yang merasa dirugikan antara pihak-pihak pengelola.

3.1.1.3 Perencanaan lampu hemat energi

Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga membuat suatu perencanaan dalam pengelolaan lampu penerangan lampu jalan untuk menghindari pemakaian daya listrik yang terlalu besar dan menghemat pengeluaran pembayaran tagihan listrik.

3.1.2 Pengorganisasian

Setelah fungsi perencanaan, maka fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian. Secara umum batasan pengorganisasian adalah merupakan keseluruhan

proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga membentuk suatu wadah yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian jelas menunjukkan bahwa pengorganisasian merupakan langkah pertama kearah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. Dapat diketahui bahwa pengorganisasian yang dilakukan yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru meliputi pengorganisasian sebagai berikut :

3.1.2.1 Pengorganisasian pemasangan lampu baru di ruas jalan yang belum ada lampu penerangan jalan umum

Dalam pengorganisasian dalam pemasangan lampu penerangan jalan umum ini, bidang yang bertanggung jawab dalam mengurus hal ini adalah Seksi Penerangan Jalan. dalam menyusun sebuah organisasi harus menempatkan orang sesuai dengan bidang yang dikuasainya. Berikut adalah pembagian tugas dalam pengorganisasian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dalam manajemen pengelolaan lampu penerangan jalan umum.

Tabel 1.7
Daftar Pembagian Tugas Bagian Penerangan Jalan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Tahun 2012

No	Jabatan	Tugas dan Wewenang
1	Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan jalan	- Mengawasi kinerja masing-masing seksi, yaitu seksi pertamanan dan ornamen, seksi pembibitan dan penghijauan, seksi penerangan lampu jalan - Bertanggung jawab ke Kepala dinas
2	Kepala Seksi Penerangan jalan	- Mengawasi setiap kinerja pengawas lapangan - Bertanggung jawaban langsung ke Kepala Bidang
3	Pengawas Pemasangan Lampu Jalan	- Mengawasi kegiatan pemasangan lampu baru - Bertanggung jawaban kepada kepala seksi
4	Pengawas Meterisasi Lampu Jalan	- Mengawasi kegiatan pemasangan meterisasi lampu jalan - Bertanggung jawaban kepada kepala seksi
5	Pengawas Perawatan dan Pergantian lampu Jalan	- Mengawasi kegiatan perawatan dan pergantian lampu jalan yang tidak layak pakai - Bertanggung jawaban kepada kepala seksi
6	Mandor	- Mengawasi kinerja pekerja harian lepas - Bertanggung jawaban kepada pengawas
7	PHL	- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing

3.1.2.2 Pengorganisasian Meterisasi

Tidak jauh berbeda dengan pengorganisasian dalam pemasangan lampu jalan, pengorganisasian dalam meterisasi lampu jalan merupakan tugas dan wewenang Kepala Seksi Penerangan Jalan sebagai penanggung jawab meterisasi lampu jalan bekerja sama dengan PLN. Dalam pengorganisasian meterisasi ini pihak Dinas Kebersihan melakukan kerja sama dengan pihak PLN dalam pemasangan meterisasi dengan cara mendata jalan-jalan yang belum termeterisasi. Selanjutnya ini menjadi tugas pengawas meterisasi untuk mengawasi kegiatan pemasangan meterisasi lampu, selanjutnya pemasangan meterisasi lampu jalan oleh pekerja harian lepas yang diawasi oleh mandor. Setelah pemasangan meterisasi selesai kemudian pengawas membuat laporan akhir yang akan dipertanggung jawabkan kepada kepala seksi penerangan jalan dalam bentuk laporan.

3.1.2.3 Pengorganisasian lampu hemat energi

Dalam fungsi perencanaan diatas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru membuat suatu gagasan yang sangat penting dalam menghemat dan meminimalisir penggunaan arus listrik yaitu memakai lampu hemat energi. Dalam pengorganisasiannya lampu hemat energi Dinas Kebersihan dan Pertamanan memberikan tanggung jawab kepada kepala seksi penerangan jalan bersama dengan staff, pengawas, mandor dan pekerja harian lepas dalam melakukan pergantian lampu hemat energi tersebut.

3.1.3 Pelaksanaan

Setelah perencanaan dibuat dan pengorganisasian disusun, maka langkah berikutnya adalah melakukan pelaksanaan/penggerakan/pengarahan. *Directing* sering juga disebut sebagai *actuating* dalam hal ini perintah merupakan alat utama pemimpin dalam menggerakkan orang-orangnya disamping petunjuk, nasehat, saran dan sebagainya sehingga mereka akan bekerja secara baik untuk mencapai rencana. Berikut adalah pelaksanaan yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan :

3.1.3.1 Pelaksanaan pemasangan pemasangan lampu baru di ruas jalan yang belum ada lampu penerangan jalan umum
pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki beberapa kendala dan pihak dinas juga tidak ingin pekerjaannya untuk melayani masyarakat terbengkalai maka mereka terus berbenah diri disemua sektor termasuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi semua para pegawainya, terbukti dalam pelaksanaannya di tahun 2012 pelaksanaan pemasangan lampu penerangan jalan umum sudah terealisasi di 24 lokasi dari 36 lokasi yang direncanakan.

3.1.3.2 Pelaksanaan meterisasi

dalam pelaksanaan pemasangan meterisasi terjalin kerja sama yang baik. Selain pengarahan pelaksanaan yang dilakukan di dalam ruang lingkup Dinas Kebersihan dan Pertamanan tersebut, juga dilakukan pengarahan atau pelaksanaan kepada pihak pengelola lainnya. Dan hasilnya sepanjang tahun 2012 pemasangan meterisasi yang sudah terealisasi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru di 47 lokasi.

3.1.3.3 Pelaksanaan lampu hemat energi

Selanjutnya di dalam pelaksanaan pergantian lampu hemat energi Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak begitu sulit dalam pengadaan bola lampu hemat energi tersebut, karena dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru menjalin kerja sama dengan pihak-pihak swasta dalam pengadaan bola lampu penerangan jalan.

3.1.4 Pengkoordinasian

Fungsi pengkoordinasian sangat penting dalam melakukan serangkaian kegiatan manajemen. Pengkoordinasian dalam manajemen pengelolaan lampu penerangan jalan umum meliputi kegiatan untuk menyelaraskan usaha, informasi dan solusi permasalahan, hubungan kerja sama tiap bidang dan bagian sebagaimana dalam struktur organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan bekerja sama dengan beberapa instansi dan pihak lainnya seperti Satlantas Polri, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pemerintah Kota Pekanbaru. Sedangkan dalam organisasi itu sendiri yang saling bekerja sama atau berkoordinasi dalam menangani urusan manajemen pengelolaan lampu penerangan jalan umum adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan dan Kepala Seksi Penerangan Jalan.

3.1.5 Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian, dan pengoreksian daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dalam pengelolaan lampu penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru meliputi pengawasan atau pemantauan terhadap kinerja pekerja harian lepas (PHL). Pengawasan yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan baik secara langsung. Dalam pengawasan langsung Dinas Kebersihan dan Pertamanan melakukan operasi rutin untuk melihat kinerja pegawai harian. Sementara pengawasan tidak langsung pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan meminta konfirmasi dari pengawas dan mandor yang ada dilapangan.

3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan di Kota Pekanbaru

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pengelolaan lampu penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan lampu penerangan jalan umum tersebut. Dimana faktor-faktor tersebut antara lain :

3.2.1 Sumber daya manusia

Jumlah pegawai harian lepas yang tidak seimbang dengan kebutuhannya merupakan salah satu faktor sangat penting untuk mewujudkan manajemen yang baik. Apabila sebuah organisasi memiliki kekurangan sumber daya manusia yang berkompeten, maka organisasi itu tidak akan bisa menjalankan program-programnya secara efisien. Jumlah pegawai yang kurang memadai pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengakibatkan tumpang tindih pekerjaan tidak dapat dihindarkan apalagi jika ada beberapa pegawai yang berhalangan masuk kerja. Dinas kebersihan dan Pertamanan juga tidak bisa melarang jika ada pegawai harian lepas tidak masuk kerja, tetapi Dinas

Kebersihan dan Pertamanan memberikan teguran atau sanksi apabila ada pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan.

3.2.2 Partisipasi masyarakat

Maksudnya adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan lampu penerangan jalan oleh Dians Kebersihan dan Pertamanan di Kota Pekanbaru. Partisipasi masyarakat dapat berupa pengaduan terhadap dimana saja lampu jalan yang padam. Namun, apabila masyarakat tidak mampu melakukan partisipasi berupa pengaduan secara langsung, dapat disampaikan berupa penyampaian saran berupa tulisan di media cetak seperti koran.

3.2.3 Kemacetan

Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan lampu penerangan jalan umum oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Pekanbaru. Kemacetan mengakibatkan pekerjaan yang sedang dilakukan tidak berjalan lancar.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari Manajemen Pemerintahan daerah Dalam Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

1. Manajemen Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru adalah dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Namun didalam pelaksanaannya masih belum optimal dan masih menemukan beberapa hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja Pemerintahan Daerah dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.
Dari semua fungsi manajemen yang diuraikan pada BAB sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa fungsi perencanaan dan pengorganisasian merupakan fungsi manajemen pemerintahan daerah dalam pengelolaan lampu penerangan jalan umum yang signifikan mempengaruhi pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan pada fungsi perencanaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan masih belum menggunakan meterisasi disemua titik lampu penerangan jalan umum yang ada di Kota Pekanbaru. Sementara pada fungsi pengorganisasian Dinas Kebersihan dan Pertamanan masih kekurangan prasarana penunjang dalam pengelolaan pengelolaan lampu penerangan jalan.
2. Belum optimalnya Manajemen Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan masalah kemacetan.

4.2 Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas, maka guna meningkatkan Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru pada masa yang akan datang, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini :

1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan lampu penerangan jalan umum agar lebih meningkatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan supaya

- pengelolaan lampu penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Agar Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru lebih intensif melakukan kegiatan perencanaan dan pengorganisasian terhadap pengelolaan lampu penerangan jalan umum.
 3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru diharapkan segera mengadakan atau melakukan pelatihan kepada pegawai harian lepas (PHL) sehingga lebih profesional dalam melaksanakan tugas.
 4. Prasarana yang memadai sangat dibutuhkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru agar pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan dalam rangka pengelolaan lampu penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagong Suyanto dan Sutinah**, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan Alternatif*. Jakarta: Kencana, 2008
- Budiono. B.**, *Pelayanan Prima*, Yayasan Kawula Indonesia, 1999.
- Dharma Setyawan Salam**, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djambatan. Jakarta. 2004.
- Djam'an, MA dan Aan Komariah**. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung. 2012.
- Inu Kencana Syafie**, *Manajemen Pemerintahan*. PT Perca. Jakarta. 2008
- Pandji. Santosa**, *Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance*. PT Refika Aditama. Bandung. 2008.
- Prajudi Atmosudirjo**, *Administrasi dan Management Umum*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982.
- Rahardjo Adisasmita**, *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2011.
- Surjadi**, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. PT Refika Aditama. Bandung. 2009.

B. Jurnal / skripsi

- Luthfi J Kurniawan**, *Pelayanan Publik Bukan Untuk Publik*, Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Wact
- Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah. 2005**. "*Laporan Evaluasi Penyelenggara Otonomi Daerah Periode 1999-2003*" Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- P. Sinambela**, *Ilmu dan Budaya*, Perkembangan Ilmu Administrasi Negara, 1992
- Alpan Irpandi**, *Lampu Penerangan Jalan LED Dengan Kontrol Otomatis*, Universitas Negeri Yogyakarta. 2012.
- Boby Rahman**, *Problematika Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Desa di Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak*. 2012.
- Irfan**, *Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pasca Pemekaran di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak (tahun 2007-2011)*. 2012.

C. Sumber Lainnya

- Surat Kabar, *Lampu Jalan Banyak Mati*. Riau pos. 3 November 2012
<http://binamarga.pu.go.id/referensi/nspm/spesifikasi458.pdf>
<http://peneranganjalanumum.blogspot.com/>